

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sayangnya, ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh di katakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih di rasakan belum banyak di berdayakan.¹ Kebijakan pendidikan nasional masih menggunakan pendekatan fungsi produksi pendidikan atau analisis input-output yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi. Apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan tersebut maka akan menghasilkan output yang diinginkan. Sebagai konsekuensi, lembaga pendidikan terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan proses pendidikan yang sesungguhnya sangat menentukan output pendidikan.

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education function atau *input-output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua

¹ Hal tersebut sebagaimana dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 54 di kemukakan bahwa 1 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2 Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*) secara otomatis akan terjadi. Tetapi dalam kenyataan mutu pendidikan yang kita harapkan tidak terjadi. Itu semua kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya: *“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”*.²

Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokrasi-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang jalurnya sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan bimbingannya, termasuk peningkatan kinerja sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

² QS. At-Taubah ayat 122.

Sesuai dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hasan yang Artinya: *“Belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya.”* (HR. Abu Hasan). Dengan maksud bukan hanya sekedar penting namun juga wajib mencari ilmu pengetahuan dan menjadi sesuatu yang utama, Dalam Al Qur'an menegaskan kepada manusia agar senantiasa berfikir untuk mendapatkan pengetahuan dengan perantaraan Kalam , hal tersebut di sebutkan berkali kali hingga 100 kali.

Peran serta warga sekolah khususnya guru dan partisipasi masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan sementara partisipasi masyarakat masih sebatas dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).³

Sekolah sebagai institusi pendidikan merupakan tempat proses pendidikan formal dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kaitan itu, sekolah bukanlah sekedar tempat berkumpul antara guru dan murid saja, melainkan sebuah tatanan yang rumit dan saling berkelindan. Oleh

³ Stakeholder merupakan suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Pelaksanaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2007, hlm. 11

karena itu sekolah dipandang sebagai salah satu organisasi yang membutuhkan pengelolaan lebih profesional. Kegiatan lain organisasi sekolah adalah mengelolah sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi demi terlaksananya pembangunan bangsa.⁴

Sebagai konsekuensi logis, ketika pendidikan semakin mahal maka pemerataan akses pendidikan akan semakin sulit terwujud. Sekolah-sekolah yang berkualitas hanya diperuntukkan bagi mereka yang berduit. Kesenjangan kualitas pendidikan antara kalangan the have dan the poor akan mengakibatkan terus menurunnya kinerja Indonesia. Hal ini tergambar dari perbedaan kualitas antara sekolah yang berada di perkotaan dengan sekolah yang berada di pedesaan. Sekolah yang berada di perkotaan hampir dapat dipastikan kualitasnya akan lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pedesaan.

Keberadaan Komite Sekolah memang harus dipertegas dengan implementasi peran dan tugasnya dalam membentuk sebuah sistem manajemen yang otonom dan baik sebagai manifestasi nyata penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di sekolah. Baik dan buruknya sebuah manajemen, memiliki konsekuensi logis yang sepadan sebagai hasil akhirnya. Demikian juga dengan manajemen Komite Sekolah, jika dilakukan dengan baik dan benar, maka kemungkinannya manajemen tersebut akan berimplikasi

⁴ Daryanto, Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Pemimpin Pembelajaran, cet. ke-1, Yogyakarta: Gava Media, 2011, 136.

pada peningkatan (*increase*) kinerja sekolah; dan jika sistem manajemen dimaksud sangat buruk dan tidak berjalan baik maka tentu saja akan berakibat pada penurunan (*decrease*) kinerja di sekolah.⁵

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Dengan demikian misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi

⁵ Sudarwan Danim, 2010, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 145

pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan.⁶ Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional.

Proses belajar mengajar khususnya pada peserta didik di SMK se Pati Selatan merupakan bentuk aktualisasi nilai yang menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa. Manajemen komite sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kondisi riil komite sekolah sebagai lembaga otonom menunjukkan indikasi kurang berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi saat adanya bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan tranformasi konsep komite sekolah memerlukan proses bertahap dari waktu ke waktu, mulai pada tingkat menyadari perlunya fungsi komite sekolah baik kepada masyarakat maupun

⁶ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah/madrasah; Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Cet. ke-3 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, 130.

penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Berdasarkan penelitian awal pada Kepala dan Komite SMK Permata Gabus, SMK Taruna Gabus, SMK Nurul Qur'an Jaken, SMK Al-Falah Winong, dan SMK Putra Mahkota Jatiroto Kayen menunjukkan bahwa Pertama, Komite Sekolah sudah terbentuk sejak tahun pelajaran 2002/2003. Setelah terbentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan, seharusnya pengurus dan anggota Komite Sekolah harus menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk mengatur tata laksana pengelolaan Komite Sekolah, termasuk di dalamnya mekanisme pembentukan Komite Sekolah priode berikutnya. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan belum ada Komite Sekolah yang sudah menyusun AD/ART nya.

Kedua, Pemberdayaan yang dilakukan terhadap Komite Sekolah adalah sosialisasi tentang peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, komite Sekolah pada prinsipnya masih sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat dan guru tentang perencanaan dalam rangka pembuatan Rencana Program Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Keempat, Adanya pendapat dari beberapa orang tua siswa/masyarakat yang beranggapan bahwa fungsi Komite Sekolah ini tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendidikan yang tidak berhasil memobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan”. Hal ini terasa signifikan karena ditandai dengan peran serta para anggota Komite Sekolah dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja di sekolah tersebut cukup mencair. Keberadaan Komite Sekolah tidak hanya sebagai pelengkap sistem struktural organisasi saja, namun kapasitas dan peran yang dilakukan Komite Sekolah serta para guru terjalin harmonis dan berada pada situasi yang cukup kondusif, begitu juga halnya kondisi masyarakat setempat. Pendidikan masyarakat cukup baik dan mereka peduli terhadap pendidikan anak-anaknya; dan mereka yang terpilih menjadi Komite Sekolah di adalah orang-orang yang mengerti dan peduli pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan?
3. Bagaimana evaluasi program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kinerja di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas, maka penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan perencanaan program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan.
3. Memahami evaluasi program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan.
4. Menganalisis Faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kinerja di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian dan pengembangan teori kepada para pelaksana lembaga pendidikan dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan.
 - b. Sebagai tambahan khazanah kelimuan di bidang strategi komite sekolah dalam membantu meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola lembaga pendidikan dan dijadikan masukan bagi komite sekolah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam usaha pengefektifan pembelajaran di Universitas.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul tersebut, maka penulis memandang perlu adanya definisi operasional yang berkaitan dengan konsep sebagai berikut:

1. Manajemen Komite Sekolah

Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.⁷ Sedangkan Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Pengadaan komite sekolah dalam suatu lembaga pendidikan adalah wujud

⁷ Senda dengan hal tersebut manajemen menurut Mulyono adalah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Yogyakarta: Ar- ruzz Media, 2009, hlm. 18.

nyata dari otonomi pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, baik itu masyarakat maupun yang terlibat langsung dalam suatu pendidikan. Komite sekolah dimanfaatkan perannya dalam usaha membantu kelancaraan proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan dasar maupun menengah.⁸

Jadi yang dimaksud manajemen komite sekolah adalah suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi mulai dari perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program, serta pengawasan evaluasi program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna memaksimalkan peran fungsi komite sekolah agar tujuan dibentuknya komite sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Meningkatkan Kinerja Guru

Meningkatkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa “meningkatkan” berasal dari kata dasar “tingkat”.⁹ Meningkatkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Meningkatkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga meningkatkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Meningkatkan berarti menaikkan derajat, taraf, dan sebagainya, mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya. Sedang Menurut Moeliono seperti yang dikutip Sawiwati, peningkatan adalah sebuah cara

71. ⁸ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Medan: Ciputat Press, 2005, hlm.

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 318.

atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.¹⁰

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam makna kata “meningkatkan” tersirat adanya unsur proses yang bertahap, dari tahap terendah, tahap menengah dan tahap akhir atau tahap puncak. Sedangkan “meningkatkan atau peningkatan” yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa yang mendapat nilai rendah, ditingkatkan agar hasil belajarnya lebih tinggi atau memuaskan dengan cara meningkatkan keterampilan belajarnya.¹¹

Sedangkan pengertian kinerja guru (prestasi kerja guru) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹² Artinya kinerja guru pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan sehingga mereka mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada instansi atau organisasi termasuk pelayanan kualitas yang disajikan. Meningkatkan kinerja adalah upaya untuk meningkatkan kinerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Agar peningkatan kinerja tersebut dapat berhasil maka perusahaan perlu mengetahui sasaran kinerja. Sasaran kinerja yang ditetapkan adalah individu secara spesifik, dalam bidang proyek, proses,

¹⁰ Akmal Hawi, “*Kompetensi Guru PAI*”, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), hlm. 11

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1197-1198

¹² AA. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 67.

kegiatan rutin dan inti yang akan menjadi tanggungjawab karyawan.¹³ Jika sasaran kinerja ditumbuhkan dari dalam diri karyawan akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasilingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah.

3. SMK Se-Kabupaten Pati Selatan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Di SMK terdapat banyak sekali Program Keahlian.

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Pendidikan kejuruan mempunyai arti yang bervariasi namun dapat dilihat suatu benang merahnya.

SMK dapat didefinisikan sebagai pendidikan kejuruan yang berarti bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan pengertian bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam dan kedalaman tersebut dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja.¹⁴ Sedangkan Pati selatan adalah

¹³ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁴ Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 211.

wilayah yang menjadi obyek penelitian, diantaranya SMK Permata Gabus, SMK Taruna Gabus, SMK Nurul Qur'an Jaken, SMK Al-Falah Winong, dan SMK Putra Mahkota Jatiroto Kayen.

Jadi yang dimaksud SMK di sini adalah Berdasarkan definisi di atas, maka sekolah menengah kejuruan sebagai sub sistim pendidikan nasional seyogyanya mengutamakan mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu memilih karir, memasuki lapangan kerja, berkompetisi, dan mengembangkan dirinya dengan sukses di lapangan kerja yang cepat berubah dan berkembang tidaknya tujuan di atas sangat tergantung pada masukan dan sejumlah variabel dalam proses pendidikan.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi penelitian ini, terdapat beberapa penelitian-penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk kajian pustaka penelitian yang relevan dengan judul "Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan." Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hasil studi terdahulu yang dapat diasumsikan memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya, yaitu: Ary Mukhlis, *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di MIN*

¹⁵ Hal inilah yang menjadi salah satu variabel dalam proses pendidikan yang menentukan ketercapaian tujuan SMK adalah kerja sama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia pendidikan tinggi. Semakin erat hubungan antara SMK dengan dunia pendidikan tinggi, logikanya semakin baik kualitas tamatannya, yang berarti kualitas tamatan dapat ditingkatkan karena di dunia pendidikan tinggi, ilmu dan teknologi akan berkembang.

*Sindutan Temon, Kulon Progo.*¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan. Pertama, peran Kepala Sekolah sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator sudah sebagian besar terwujud, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kedua, upaya Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan memberikan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Ketiga, hasil dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan yakni diukur dari evaluasi secara formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang semakin beragam, serta meningkatnya prestasi akademik peserta didik sehingga peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang difavoritkan. Keempat, faktor pendukung dalam upaya ini yaitu: madrasah telah mendapatkan legalitas dengan memperoleh akreditasi A selama dua kali periode, adanya fasilitas yang memadai yang berbasis IT dan multimedia, peran orang tua dan ketulusan doa serta keihlasan orang tua menyekolahkan putra putrinya di madrasah tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: penggunaan sarana IT dan media madrasah kurang optimal, terdapat 10% guru yang belum menguasai IT dengan baik, 10 % guru yang kurang optimal dalam memanfaatkan prasarana serta kreativitasnya, latar belakang orang tua yang heterogen dari sisi ekonomi dan pendidikan sehingga mempengaruhi mindset nya pula dalam menyelesaikan permasalahan anaknya.

¹⁶ Ary Mukhlis, *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di MIN Sindutan Temon, Kulon Progo*. Tesis, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017

Abdul Azhim, *Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan*. Hasil temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa manajemen Komite Sekolah, sebagai bentuk pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dalam peningkatan kinerja di MTs Negeri 2 Medan adalah: 1] Perencanaan yang dilaksanakan Komite Sekolah dioptimalkan pelaksanaannya dalam kegiatan belajar mengajar, perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan mutu guru dan kegiatan ekstra-kurikuler; 2] Pengorganisasian sumberdaya Madrasah oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 2 Medan berupa partisipasi dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program-program di Madrasah, sehingga beberapa penyimpangan yang berarti dapat diperbaiki seperlunya sekaligus sebagai masukan konstruktif bagi perencanaan berikutnya; 3] Pelaksanaan program Komite Sekolah dilakukan dengan tahapan yang mencakup: perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan evaluasi (*evaluating*) dalam hal pembiayaan Madrasah terutama dalam meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan-kegiatan Madrasah, peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif tambahan, saran-saran penentuan kebijakan Madrasah dalam rapat dengan Kepala Sekolah dan guru serta keterlibatan dalam penyusunan anggaran belanja Madrasah; dan 4] Pengawasan yang dilaksanakan Komite Sekolah adalah berupa kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada. Kaitannya dengan pelaksanaan

program adalah bagaimana alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program yang dilakukan sekolah, dengan tetap melakukan penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah.¹⁷

Nur Hasanah, *Optimalisasi Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun 2014-2015)*.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: kinerja Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa dapat dikatakan sudah baik, namun harus terus ditingkatkan Kedua, optimalisasi Komite Sekolah telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa dengan keempat perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pemberi dukungan (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*) dan badan penghubung (*mediator agency*), namun masih belum maksimal. Ketiga, faktor pendukung meliputi: pembentukan dan pemilihan Komite Sekolah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, hubungan kerjasama Komite dan Kepala Madrasah yang lebih mudah, dan dukungan kuat masyarakat terhadap madrasah. sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya pengetahuan tentang tugas-tugas Komite Sekolah, dan kurangnya independensi dan profesionalitas Komite Sekolah.

Ahmad Khozin, *Strategi Komite Sekolah Dalam Membantu Meningkatkan Kinerja (Studi Multikasus di SMK Al-Khozini Ganjaran dan*

¹⁷ Abdul Azhim, *Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan, 2010*, Tesis: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan 2010.

¹⁸ Nur Hasanah, *Optimalisasi Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun 2014-2015*, Tesis. Program Pascasarjana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Kudus, 2015.

MA Raudlatul Ulum Ganjaran Gondanglegi Malang). Dalam Penelitian ini diperoleh kesimpulan: 1) Perencanaan kinerja komite sekolah meliputi; (a) penetapan perencanaan awal tahun, (b) perencanaan kebijakan selama satu tahun, (c) perencanaan peningkatan program kerja SDM guru, (d) perencanaan anggaran, (e) perencanaan penambahan gedung dan perbaikan gedung, dan (f) standar kebutuhan tujuan pendidikan. 2) Pelaksanaan kinerja komite sekolah meliputi; (a) Pelaksanaan kegiatan program kerja, (b) melaksanakan peningkatan SDM guru (berbentuk workshop/pelatihan), (c) pelaksanaan penambahan gedung dan perbaikan gedung, dan (c) melaksanakan standar kebutuhan tujuan pendidikan. 3) Evaluasi yang dilakukan komite sekolah SMK Al-Khozini meliputi evaluasi kondisional dan evaluasi tahunan, sedangkan evaluasi yang dilakukan komite sekolah MA Raudlatul Ulum meliputi evaluasi 3 bulanan dan evaluasi tahunan.¹⁹

Adapun penelitian yang penulis lakukan dengan judul mengandung persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang peran Komite Sekolah dalam mengupayakan peningkatan kinerja di satuan pendidikan tertentu dalam hal ini penulis fokuskan pada pola manajemen Komite Sekolah. Perbedaannya dalam penelitian ini memfokuskan manajemen komite dalam peningkatan kinerja yang berada di sekolah kejuruan dan lingkupnya lebih luas, tidak hanya pada satu lembaga pendidikan saja tetapi dalam wilayah Se-

¹⁹ Ahmad Khozin, *Strategi Komite Sekolah Dalam Membantu Meningkatkan Kinerja Studi Multikasus di SMK Al-Khozini Ganjaran dan MA Raudlatul Ulum Ganjaran Gondanglegi Malang*, Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, 2017.

Kabupaten Pati Selatan dimana jumlah SMK di Pati Selatan terhitung berdekatan. Tentu hal ini dapat menimbulkan persaingan bagaimana pendidikan di sekolah-sekolah tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan jasa pendidikan dan memberikan alternatif pilihan lembaga pendidikan yang memiliki program unggulan, sehingga manajemen Komite Sekolah harus lebih diberdayakan untuk mengupayakan bagaimana kiat peningkatan kinerja di lembaga masing-masing dapat diterima sebagai harapan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal, bagian isi dan pelengkap; pada bagian awal memuat halaman sampul (cover), halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persembahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pedoman transliterasi dan abstrak.

Pada bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Operasional, dan Penelitian Terdahulu.

BAB II DESKRIPSI TEORI mendeskripsikan Kajian Teori, Manajemen Komite Sekolah, Peningkatan Kinerja, dan Kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi dan waktu Penelitian, Data dan sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Deskripsi Data tentang Manajemen Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja SMK Se-Se-Kabupaten Pati Selatan, Pembahasan Data tentang Manajemen Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja SMK Se- Se-Kabupaten Pati Selatan, Keterbatasan Penelitian

BAB V PENUTUP, Kesimpulan, Saran-Saran.

Bagian akhir berisi Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi, Daftar Riwayat Pendidikan Penulis.

